

# **ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI KABUPATEN BIMA**

Hartoyo

Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
STKIP- Bima

e-mail: Ompu\_Toyo@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan suatu standar pemerintahan yang mencatat dan mengakui transaksi pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan kas dan setara kas diterima atau dibayarkan. Penerapan SAP berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesiapan infrastruktur pendukung pada pemerintah. Pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Bima belum menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh, namun sudah menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Di tahun 2015, pemerintah Kabupaten Bima dituntut menerapkan secara penuh akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai amanat PP No. 71 tahun 2010. Dengan adanya peraturan tersebut, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui; 1) bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan SAP berbasis akrual, 2) bagaimana kesiapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dan bagaimana komitmen organisasi dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada pendekatan interpretif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, dan 4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) kesiapan dari SDM pemerintah Kabupaten Bima belum siap karena masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis akrual, 2) kesiapan dari SIA menunjukkan bahwa sudah ada sistem khusus yang bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan dalam pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bima, dan 3) komitmen organisasi sangat mendukung penerapan basis akrual.

**Kata Kunci** : Kesiapan, basis akrual, infrastruktur pendukung.

## Abstract

The accrual-based Governmental Accounting Standard 'Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)' is a governmental standard which records and acknowledges the on-going transactions without paying attention to the cash and the like which is accepted or paid. The implementation of the accrual-based SAP can improve transparency and accountability of the management of the regional finance. To this end, the government should prepare the supporting infrastructure. The Indonesian government in general and Bima Regency in particular had not fully implemented the cash-based accounting leading to accrual. In 2015, the government of Bima Regency is required to fully apply the accrual-based accounting to the financial statement in every Department 'Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)', as instructed by the Act No. 71 of 2010. With reference to such an Act, this present study was intended to identify 1) the readiness of the Human Resources 'Sumber Daya Manusia (SDM)' of the government of Bima Regency to implement the accrual-based SAP, 2) the readiness of the Accounting Information System 'Sistem Informasi Akuntansi (SIA)' of the government of Bima Regency in implementing the accrual-based SAP, and to what extent the organization was committed to implement the accrual-based SAP.

Qualitative method was used in the present study, emphasizing the interpretative approach. The data were analyzed through four stages; they are 1) Data Collection, 2) Data Reduction, 3) Data Presentation, and 4) Decision Making or Verification. The result of the study showed that 1) the SDM of the government of Bima Regency had not been ready as they were still in the learning process to understand the implementation of the accrual-based SAP, 2) the readiness of SIA showed that there was a specific system named the System of Regional Management Information 'Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)' used by the financial statement by the government of Bima Regency, and 3) the organizational commitment strongly supported the accrual-based implementation.

**Keywords :** Readiness, accrual-based, supporting infrastructure.

## PENDAHULUAN

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima)

tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas.

Untuk mewujudkannya diperlukan aparat pemerintah yang mampu menerapkan dalam praktiknya. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi aparat pemerintah yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Selain itu, dalam suatu organisasi pastinya memiliki komitmen yang berbeda yang akan berdampak juga dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bima masih menerapkan basis kas menuju akrual dalam menyusun laporan keuangan. Namun pemerintah daerah dituntut untuk segera menerapkan basis akrual secara penuh oleh pemerintah pusat.

Drs.H.MuhammadTaufik Har,M.Si selaku Sekda Kabupaten Bima mengatakan melalui Sosialisasi ini para pejabat pengelola keuangan daerah khususnya pengguna anggaran agar mampu memahami perubahan regulasi sehubungan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2015.

Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bima. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah daerah Kabupaten Bima harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia,

dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Selain itu, dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah untuk segera menerapkan basis akrual.

Oleh sebab itu, penelitian di pemerintah Kabupaten Bima menjadi pilihan untuk diteliti lebih lanjut mengenai kesiapan pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan basis akrual dilihat dari segi infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan komitmen organisasi.

Dari latar belakang tersebut, dapat diangkat judul penelitian yaitu "Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bima".

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilihat dari kesiapan Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, dan komitmen dari organisasi pemerintah Kabupaten Bima.

Menurut Wijaya dalam Faradillah (2013), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Menurut Sinaga dalam Faradillah (2013) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Menurut Kusnadi, dkk (1999:106) Dasar akuntansi akrual mengakui dan

melaporkan efek transaksi dan kejadian lainnya atas aktiva, utang, penghasilan dan beban dari suatu organisasi bisnis dan jika dalam organisasi pemerintahan pada dana atau transaksi uangnya (kasnya) masih belum diterima atau belum dibayar. Akuntansi pemerintahan berhubungan dengan penghasilan dan pengeluaran terlebih pada penerimaan dan beban pemerintah. Oleh karena itu, hanya dasar akrual yang dapat diperbandingkan kepada pendapatan pada periode terjadinya peristiwa.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:54) basis akrual (*accrual basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Menurut Mardiasmo (2002:155), pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*. Penentuan hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Menurut Bastian (2010:315), keuntungan basis akrual yaitu 1) basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh, 2) basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan, dan 3) basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.

Menurut Wibowo dalam Herlina (2013) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Selain itu penerapan basis akrual juga ditentukan oleh sistem yang digunakan.

Menurut Faradillah (2013) kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya. Menurut Cushing dan Kosasih (1989:17) Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan manusia dan sumber-sumber modal didalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi.

Menurut Robbins dan Judge dalam Kurniawan (2011) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuantujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Luthans (2002:235) mengatakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap mengenai kesetiaan karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Sikap ini merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus (kontinyu) dimana karyawan juga memperlihatkan kepedulian tinggi pada organisasi, sehingga komitmen organisasi merupakan sikap kerja yang bersifat tahan lama (*durable*) dan stabil.

Penelitian yang dilakukan Faradillah (2013) yang berjudul "Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010)" menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Namun dalam penelitian Mangoloi menyebutkan bahwa secara keseluruhan sudah ada dukungan dari pemerintah pusat untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi masih ada kendala dari sisi kebijakan teknis yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diangkat

dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, 2) bagaimana kesiapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan 3) bagaimana komitmen organisasi dengan adanya perubahan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

## **METODE**

Metode penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Peneliti memilih pendekatan interpretif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Bima menuju penerapan standar akuntansi pemerintahan baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi dan menyiapkan daftar wawancara. langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dengan teknik analisis Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91) untuk dibuat laporan penelitiannya. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan ideal pada bagian teori. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah *purposive*. Menurut Sugiyono (2011:68) teknik ini tidak melakukan generalisasi namun penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Penentuan informan berdasarkan keterlibatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91), yaitu

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan atau verifikasi.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Bima belum siap dalam penerapan basis akrual karena terkendala dalam kemampuan sumber daya manusia. Hal ini terlihat saat peneliti mewawancarai beberapa pegawai di beberapa SKPD di Kabupaten Bima. Pemahaman mereka mengenai basis akrual tidak sepenuhnya dimengerti dan masih memerlukan bantuan dari pihak lain untuk memahami dan mempraktekkan basis ini.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang menjadi bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas laporan keuangan.

Dalam penerapan SAP berbasis akrual hendaknya manajemen suatu organisasi yang menerapkannya memiliki kemampuan yang sudah memahami tentang basis akrual. Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai akan tercermin dari masing-masing individu yang melaksanakan tugas yang diberikan atasannya. Oleh karena itu, penerapan basis akrual belum sepenuhnya bisa diterapkan karena masih dalam tahap pembelajaran.

### **Pemahaman Akuntansi Basis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Bima**

Untuk menerapkan basis akrual, maka diperlukan pemahaman khusus dalam mengimplementasikan basis yang bisa dikatakan tergolong baru di pemerintahan. Pengetahuan yang dimiliki

oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya basis ini. Pemahaman bapak putarman, SE sebagai kepala Dinas Pendapatan daerah kabupaten Bima terhadap basis akrual berikut ini:

“Kalau menurut saya akrual itu merupakan suatu pencatatan yang dilakukan pas terjadi kejadian atau adanya suatu penerimaan barang, yang berhubungan nanti sama kas, tetapi disini ditekankan pada pengakuannya. Setelah barang diterima kemudian itu sudah diakui barang sepenuhnya milik kita, walaupun misalnya barang tersebut belum dibayarkan”.

Basis akrual diartikan sebagai basis akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Namun bapak Putarman selaku kepala dinas terkait menjelaskan pengertian basis akrual yang diungkapkan berikut ini:

“Menurut saya basis akrual ini dapat memberikan gambaran utuh posisi keuangan, artinya kita sudah mengetahui seberapa kita mempunyai kekayaan, utang dan lain sebagainya. Dengan basis ini kan kita dapat melihat berapa keuntungan yang dimiliki di awal sebelum kas diterima”.

Berdasarkan tanggapan diatas dikatakan bahwa akuntansi berbasis akrual dapat menyajikan informasi seluruh posisi keuangan yang terdiri dari posisi aset, utang dan kekayaan bersih dari suatu entitas. Akuntansi akrual memberikan informasi atas pendapatan dan beban, meliputi pengaruh dari transaksi yang kasnya belum diterima atau dibayarkan.

Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Basis akrual mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya/beban. Konsep pengakuan pendapatan menimbulkan estimasi piutang tak tertagih,

sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Sedangkan konsep pengakuan biaya/beban dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya beban meskipun biaya tersebut belum dibayar. Akuntansi akrual diperlukan oleh organisasi untuk memelihara catatan yang lengkap mengenai aset dan utang, sehingga memfasilitasi pengelolaan aset yang lebih baik. Namun Drs.H.Budiman menambahkan penjelasan sebagai berikut.

“Sebenarnya sih kalo menurut saya basis akrual itu dapat mengukur kinerja dari setiap SKPD nantinya. Sejauh mana kinerja SKPD akan terlihat nantinya. Ini akan terlihat pada ketepatan pencatatan yang seharusnya sudah dicatat tapi masih dibiarkan begitu saja. Itu akan menimbulkan utang nantinya jika itu dibiarkan. Nah dari sana saja sudah keliatan kinerjanya, apakah dia malas untuk mengerjakan tugasnya atau tidak”.

Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

### **Penerapan Basis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual)**

Saat ini pemerintah Kabupaten Bima masih menggunakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual atau *Cash Toward Accrual (CTA)* dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Basis CTA ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan Basis akuntansi *modified accrual*, sistem akuntansi dan aplikasi komputer yang digunakan dan dikembangkan sendiri.

Pernyataan mengenai basis kas menuju akrual yang dijelaskan oleh bapak putarman SE, selaku kepala dinas

pendapatan daerah kabupaten Bima berikut ini:

“*Kan* sebelumnya juga sudah ada hanya saja ada metodenya nanti ini bagaimana pemberlakuannya itu karena sebelumnya kita mengacu ke *cash basis*. Kas menuju akrual itu kan sudah kita lakukan. Dan perangkatnya juga sudah ada komputernya sudah ada. Hanya saja perbedaannya kalo akrual basic kan di LRA juga harus diakrualkan kan sebelumnya di *cash basis*, pendapatan, belanja, pembiayaan kita *cash kan*, nanti di neraca kita lakukan itu akrualnya. Tapi sekarang kan seluruhnya sudah harus diakrualkan. Sederhana akrualnya kita langsung mengakui pendapatan pada saat APBD ditetapkan. Jadi pada saat APBD ditetapkan kita sudah akui. Pada saat akhir tahun kemudian pendapatan tidak mampu dipenuhi berarti itu menjadi piutang”.

Berdasarkan ungkapan diatas disampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bima masih menggunakan basis *cash toward accrual (CTA)* dalam pelaporan keuangan. Namun penerapan basis akrual akan segera dilaksanakan mengingat telah disiapkan *software* pengolahan data untuk membuat laporan keuangan berbasis akrual. Perbedaan yang mendasar antara CTA dan *accrual basis* yaitu dilihat dari laporan realisasi anggaran. Pendapatan LRA diakui pada saat anggaran telah ditetapkan, namun jika pendapatan tidak mampu dipenuhi maka akan menjadi piutang. Pendapatan akan diakui pada periode selanjutnya.

Perbedaan utama antara Basis Kas Menuju Akrual dengan Basis Akrual adalah pada basis pengakuan pendapatan dan biaya. Sebagaimana dijelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan biaya pada basis kas dilakukan berdasarkan masuk dan keluarnya kas, sementara basis akrual berdasarkan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

## **Persiapan dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Pemerintah Daerah yaitu infrastruktur pendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Infrastruktur pendukung yang dimaksud adalah kebijakan persiapan dan model penerapan, manajemen sumber daya manusia, dan sistem informasi akuntansi. Disamping itu, penerapan akuntansi berbasis akrual harus didukung oleh komitmen dari Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam tahun 2014 untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam tahun anggaran 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 64 tahun 2013 di antaranya: 1) tetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berlaku baik bagi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, 2) tetapkan peraturan kepala daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang meliputi sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD, 3) Susun Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap, 4) pilih/kembangkan aplikasi komputer pengelolaan keuangan daerah, 5) pilih dan latih tenaga akuntansi. Terbatasnya tenaga akuntansi pada masing-masing pemerintah daerah sampai ke tingkat SKPD menjadi kendala umum yang terjadi dalam penerapan akuntansi pemerintahan.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai basis akrual dapat dijelaskan sebagai berikut. Kabag keuangan daerah, M. Yamin, S.Sos memaparkan: "Pemerintah Daerah Bima telah memiliki 2 Perbup mengenai SAP ini, namun belum dipublikasikan. Pertama, ada Perbup No. 8 tahun 2014 yang mengatur

tentang kebijakan akuntansi dan yang lagi satu perbup No. 7 tahun 2014 mengenai sistem akuntansi pemerintah kabupaten Bima. Itu mengenai regulasinya".

Dengan ditetapkannya kebijakan ini, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Bima.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Sosialisasi mengenai PP 71 telah dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Bima yang disampaikan oleh BPK mengenai arahan pengelolaan keuangan. Sementara itu Bupati Bima Hj. Indah Damahyanti Putri mengingatkan pada para Kepala SKPD dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan yang ada. Begitu pula dalam membuat laporan keuangan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh M.Yamin,S.Sos selaku kabag keuangan:

"Kalau sosialisasi PP No. 71 tahun 2010 sudah dilakukan 3 kali. Pertama itu dilaksanakan pada November 2013, kemudian Juli 2014 dan Agustus 2014. Pada sosialisasinya itu kami mengundang seluruh SKPD di Kabupaten Bima. Terutama yang kami harapkan untuk hadir dalam sosialisasi yaitu kepada Kabag Keuangan di masing-masing SKPD".

Berdasarkan ungkapan diatas, persiapan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima dalam penerapan basis akrual yaitu telah dilakukan sosialisasi implementasi PP No.71 tahun 2010 selama 3 kali. Dalam sosialisasi ini di ikuti oleh

pegawai pada bagian keuangan di seluruh SKPD. Strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan langkah-langkah yaitu 1) sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan skill pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak, 2) menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur, 3) melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

### **Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual**

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi.

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri,2010).

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Selain itu, menurut Bastian (2006), pada saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

Menurut hasil wawancara tanggapan ibu hajrah mengenai SDM di pemerintah kabupaten Bima berikut ini:

“Karena rata-rata *background* pegawai yang disini itu tamatan yang bukan akuntan. Tapi ada juga beberapa orang yang tamatan pendidikan akuntansi dan juga ekonomi. Tapi kita akan tetap bimbing dan latih mereka dari awal untuk memahami basis akrual ini”.

Masalah yang paling menonjol yang diungkapkan adalah ketidaksesuaian pekerjaan yang diemban dengan pendidikan yang telah ditempuh oleh pegawai. Dalam hal ini pemerintah pusat harus melatih kembali pegawai yang kurang mengerti dengan bidang pekerjaan yang didapat. Hal ini dapat memperlambat keberhasilan suatu organisasi di pemerintah daerah. Adanya sumber daya manusia yang bekerja bukan pada bidangnya menjadi pengaruh yang besar karena SDM yang tamatan bukan dari ekonomi tersebut pasti belum mengenal basis akrual.

Bapak Drs.H.Taufik Har,M.Si mengatakan bahwa kendala yang paling menonjol yang dirasakan yaitu sumber daya manusia yang menangani basis akrual ini berikut ini:

“Kami *sih* masih mendalami pemahaman dan masih mencoba menginput data. Kami belum bisa sepenuhnya menerapkan. Butuh proses yang lama untuk memahaminya. Kendala kedepannya mungkin SDM-nya ya. Soalnya kan pemahaman masing-masing orang itu berbeda”.

Kualitas SDM yang belum memadai memang menjadi kendala sebab yang akan menerapkan suatu basis akrual adalah SDM itu sendiri. Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM ada di daerah.

Dilihat dari sisi kualitas sumber daya manusia untuk mengetahui kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilakukan analisis terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap dan sistem manajemen SDM.

#### 1. Pengetahuan

Setiap pegawai hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai basis akrual sebelum menerapkannya. Pengetahuan pegawai di pemda Bima masih kurang tentang basis akrual ini.

#### 2. Keterampilan

Keterampilan berbeda dengan pengetahuan meskipun sama-sama dapat menentukan tingkat kualitas SDM. Keterampilan yang dimiliki pegawai di pemda Bima dalam hal melakukan praktik akuntansi berbasis akrual masih kurang sehingga masih perlu dilakukan pelatihan-pelatihan khusus tata cara penginputan data ke sistem akuntansi yang telah disediakan pemerintah daerah berupa SIMDA.

#### 3. Sikap

Setelah mereka mengikuti sosialisasi bahwa basis akrual memiliki manfaat dan tantangan baru, sikap yang ditunjukkan adalah mendukung rencana tersebut. Pegawai di pemda Bima sebagian besar ingin mampu menerapkan basis akrual ini secara baik. Mereka terus berusaha untuk memahami basis ini dan terus melakukan pelatihan-pelatihan dalam meng-*input* data ke sistem akuntansi.

Oleh karena itu, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pemerintah Kabupaten Bima dapat dikatakan belum siap karena mereka belum memahami sepenuhnya mengenai basis akrual. Pelatihan penerapan basis akrual harus rutin dilakukan dalam menginput data ke sistem yang berbasis akrual. Selain itu, latar belakang pendidikan non akuntansi yang dimiliki pegawai menjadi alasan utama. Pemerintah daerah harus berupaya untuk memotivasi para pegawai di dalam memahami basis ini.

### **Analisis Kesiapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual**

Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi.

Analisis kesiapan sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari sistem yang digunakan untuk membuat pelaporan keuangan. penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan sistem untuk membuat laporan keuangan yang diberikan oleh pusat. Sistem yang bernama SIMDA merupakan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang berbasis akrual.

Aplikasi SIMDA dapat dimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi *multi user* dan teknologi *client/server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan yaitu pengendalian transaksi terjamin, efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya, serta cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan. Dengan adanya SIMDA dari pemerintah pusat maka pengelolaan laporan keuangan akan lebih mudah dilaksanakan. Hanya saja SDM yang menerapkan belum menguasai keseluruhan sistem tersebut. Pemerintah Kabupaten Bima masih dalam tahap belajar di dalam meng-*input* data-data ke sistem ini. Berikut tanggapan yang dipaparkan bapak M.Yamin, S.Sos selaku kabag keuangan mengenai kesiapan sistem informasi akuntansi:

"Kami telah mengadakan diklat bimtek kepada staf keuangan di SKPD, terutama kepada kasubbag keuangan, kasubbag anggaran, kasubag perencanaan. Selain itu, kita menekankan juga kepada pihak independen di SKPD, yaitu kepada pihak pengujian keuangan perbendaharannya untuk memahami basis akrual ini".

Dengan diadakan bimpek ini beliau berharap para pegawai keuangan di SKPD mampu menerapkan sistem informasi yang baru dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Namun kenyataannya para pegawai tidak selalu hadir dalam pelatihan tersebut. Pelatihan yang dilakukan secara rutin akan mempercepat penguasaan praktek sistem akuntansi yang diberikan.

Dengan demikian kesiapan dari segi IT atau sistem informasi akuntansi untuk menerapkan SAP berbasis akrual pada pemda Kabupaten Bima sudah disiapkan sistem berupa SIMDA yang telah di- *instal* di perangkat komputer di pemda.

### **Komitmen Organisasi dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual**

Menurut Bastian (2006), dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

Tanggapan Bapak Adnan, MM selaku kabag Keuangan di Sekretariat DPRD mengenai komitmen organisasi berikut ini: "Yahh, kalo kita di tingkat SKPD kan kita sebenarnya posisinya menerima apapun itu yang menjadi aturan. Karena kalau sudah menjadi aturan kita harus ikuti sisa bagaimana kita menambah wawasan menambah kualitas kita untuk bisa memahami aturan tersebut. Persoalan mau akrual mau basis kas menuju akrual persoalan metode saja. tetapi yang pasti

katanya kita lebih repot kalau akrual katanya ketimbang basisnya kas. Tapi nanti kita lihat bagaimana penerapannya nanti".

Berdasarkan tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa komitmen pemimpin dalam hal menerima perubahan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Beliau berpendapat bahwa jika telah ditetapkan aturan dalam menerapkan basis akrual maka harus dilaksanakan.

Pernyataan yang mendukung penerapan basis akuntansi ini disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku Kabag Anggaran Sekretariat DPRD kabupaten Bima berikut ini:

"Iya sangat mendukung penerapan akrual ini, bahkan beliau memberikan motivasi kepada kita agar dapat melaksanakan dengan baik.

Disamping itu juga dari pemda sendiri menginginkan opini audit WTP dari BPK. Karena Pemda Bima masih dinyatakan WDP dan ini artinya kami belum sempurna betul".

Komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan reformasi di bidang akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan sangat didukung oleh komitmen yang dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan perubahan yang mengarah kondisi keuangan yang lebih baik. Komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan harus ada dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama, bahkan lebih lama dari masa periode jabatan presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPR/DPRD.

Jadi, komitmen pemerintah Kabupaten Bima dalam penerapan SAP berbasis akrual sangat mendukung peraturan yang telah ada dan ingin segera menerapkannya.

Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk terus berusaha belajar dan berlatih dalam penerapan SAP berbasis akrual dalam pelaporan keuangan.

**SIMPULAN DAN SARAN** Kesiapan pemerintah kabupaten Bima dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yaitu masih melakukan persiapan-persiapan dalam menuju implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Bentuk persiapan pemerintah kabupaten Bima seperti sosialisasi kepada aparat pemerintah kabupaten Bima, mengadakan bimtek kepada bagian keuangan di SKPD kabupaten Bima, menetapkan kebijakan akuntansi yang berupa peraturan bupati mengenai sistem akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah awal pemerintah kabupaten Bima dalam implementasi SAP berbasis akrual di tahun-tahun akan datang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa; 1) kesiapan pemerintah Kabupaten Bima dilihat dari kualitas sumber daya manusia (SDM) belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena dalam menggunakan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) masih perlu dilakukan pelatihan-pelatihan cara pengaplikasiannya, 2) kesiapan pemerintah Kabupaten Bima dilihat dari segi IT/sistem informasi akuntansi sudah menyiapkan *software* dan *hardware* yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual, dan 3) komitmen organisasi pemerintah Kabupaten Bima mendukung peraturan yang telah ada dan ingin menerapkan basis akrual.

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu 1) diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, 2) pelatihan dan bimbingan kepada SKPD di kabupaten Bima hendaknya terus dilakukan, dan 3) sebaiknya pemerintah kabupaten Bima meningkatkan koordinasi kepada SKPD lainnya mengenai kebijakan yang ditetapkan dari atasan kepada

bawahan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaksana kebijakan.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menilai kesiapan pemerintah daerah dari tiga sudut, yaitu kesiapan dari sumber daya manusia, kesiapan sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi dan penilaian kesiapan pegawai keuangan dalam pemerintahan hanya menggunakan persepsi, tidak dinilai secara langsung dari hasil pelaksanaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2014. "Sosialisasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah". Tersedia pada [www.gianyarkab.go.id](http://www.gianyarkab.go.id) (diakses tanggal 1 Oktober 2014).

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Cushing, Barry E dan Ruchyat Kosasih. 1989. *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Faradillah, Handi. 2013. "Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010)". *Skripsi* (tidak diterbitkan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Halim, Abdul dan M.S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Herlina, Hetti. 2013. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam

Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris pada Kabupaten Nias Selatan)". *Skripsi* (tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

-----, 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Kurniawan, M. Rizki Nur. 2011. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik". *Skripsi* (tidak diterbitkan). Universitas Diponegoro Semarang.

Kusnadi, dkk. 1999. *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*. Bandung: Universitas Brawijaya Malang.

Luthans. 2002. *Organizational Behavior*. Edisi Ke-9. New York : McGraw-Hill.

Mangoloi, Raflika Septarina. 2013. "Analisis Kesiapan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Biro Keuangan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)". *Skripsi* (tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Mulyana, Budi. 2009. "Penggunaan Akuntansi AkruaI di Negara-negara Lain: Trendi Negara-negara Anggota OECD". Tersedia pada <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansberbasisakruaI.pdf> (diakses tanggal 9 Mei 2014).

Putri. (2012). "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Pemda Kab. Bengkalis". *Skripsi* (tidak diterbitkan). Univeristas Sriwijaya, Bengkalis.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.